

**Interaksi Antar Negara Asean *Plus Three* Terhadap Proses
Institusionalisme *Second Track Diplomacy*: Neat 2009- 2019**

Arthanami Ekakrisima Panjaitan
BINUS University
arthanami@gmail.com

Abstract

This paper aims to answer the question on “ How is the interaction among the ASEAN Plus Three countries in the process of institutionalization of Network of East Asian Think-tanks (NEAT) in The ASEAN Plus Three Regionalism?”. The objective of this research is to get an explanation on the interaction between every country in the ASEAN Plus Three Regionalism on the NEAT institutionalization. This research uses the document research as the study method. As an international institution NEAT is an epistemic community As an epistemic community NEAT holds a variety of research which called as working groups. The result of the working group will be recommended as a policy recommendation. This recommendation will be delivered to the APT leaders to be amendment as a policy. Haas says, as a think tank NEAT directly identifies the state interests and illuminates the decision makers about the salient dimensions of the issue. After that the decision makers in one state may, in turn, influence the interests and behavior of other states. Different with another approachment the actor of an epistemic community is an individual states but still sometimes there tends to be a hegemony of idea in the process of policy decision. In balance with Ikenberry theory that if there is any leading state joins an international institution then that sleading state will ripe another weaker state in order to pursues their interests. This paper suggests that NEAT should enhance the institutionalization as the first official think tank in APT regionalism.

Keywords: NEAT, second track diplomacy, think tank, Epistemic Community, International Institution

Abstrak

Selama satu dekade berturut-turut yaitu 2009- 2019 NEAT secara rutin mengadakan *Working Group*. Namun China dan Jepang mendominasi *sponsorship* jumlah *Working Group*. Hal ini secara langsung mempengaruhi putusan yang tidak mewakili kepentingan bersama dari seluruh anggota NEAT. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pergerakan Asia Timur khususnya interaksi antar negara anggotanya dilihat melalui NEAT sebagai *secondtrack* dari kerja sama Asia Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu berdasarkan dokumen-dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh pertemuan Asia Timur dan NEAT. Jenis metode penelitian dokumentasi seperti ini pada umumnya akan sepenuhnya berfokus kepada laporan-laporan dan informasi resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau agen internasional. Dari analisa tersebut dapat terlihat ciri khas dari sebuah institusi internasional yang dimiliki oleh NEAT. Ciri yang pertama memperlihatkan bahwa NEAT merupakan sebuah jaringan yang terdiri dari kelompok akademisi yang memiliki keahlian atau kompetensi mengenai kebijakan internasional. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lahir dari adanya penelitian yang relevan. Dari ciri khas diatas menggambarkan bahwa NEAT berada pada tahap *Epistemic Community* dalam tingkatan institusi internasional Ruggie. Pada akhirnya hasil dari penelitian ini membenarkan hipotesis yang dipaparkan pada awal penulisan. Bahwa NEAT berhasil memberikan sudut pandang dari ranah ilmu yang mampu memberikan gambaran hubungan politik. Namun interaksi dari negara-negara anggota NEAT masih dikuasai oleh negara Asia Timur.

Kata Kunci: NEAT, *second track diplomacy*, *think tank*, *Epistemic Community*, *Institusi Internasional*

Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Timur tidak dapat diabaikan oleh ASEAN. Kemajuan drastis dari perkembangan ekonomi di negara-negara Asia Timur menjadi suatu *new emerging markets*. Selain itu bersamaan dengan itu kemajuan ekonomi Jepang yang sudah canggih dan berjalan cepat, serta ketangguhan daya saing ekonomi Korea Selatan menjadikan kebersaingan tersendiri bagi ASEAN. Kekuatan interaksi dan integrasi ekonomi diantara negara-negara tersebut telah membuat mereka muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia yang patut diperhitungkan. Berlatar belakang dari hal-hal tersebut maka pada Desember 1997 ASEAN, melalui ‘*informal summit*’ di Malaysia yang mengundang para pimpinan dari China, Jepang dan Korea Selatan di sepakati terbentuknya ASEAN+3, pada pertemuan tersebut dapat disarikan: *If ASEAN is to have a bigger say in trade negotiation internationally, then it must work together with the East Asian Countries. The East Asia Economic Group or EAEG will be sufficiently strong to gain the respect of both the AC and the NAFTA. Even presently the country of South East and East Asia together form a formidable market. But the potential for growth of the*

EAEG is far greater than that of the EC and NAFTA. This fact will also increase the cluot of the EAEG. (Severino R. C., South East Asia in Search of an ASEAN Community, 2006)

Berangkat dari pertemuan ini kemudian secara berkala menjadi forum dialog antara 10 negara ASEAN dan 3 negara Asia Timur tersebut. ASEAN sebagai contoh regionalisme dapat memberikan pandangan dan pemikiran dalam menentukan arah kemana regionalisme baru Asia Timur akan berkembang. Keberhasilan dan hambatan-hambatan ASEAN dalam melangkah maju menunjukkan wilayah ini sungguh-sungguh bergerak walaupun lambat dan berhati-hati kearah regionalisme yang lebih eksklusif.

Salah satu wujud gerakan ASEAN untuk menjalin hubungan dengan negara-negara di Asia Timur adalah dengan membentuk ASEAN +3. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam Jepang, China dan Korea semakin bersatu secara berkala. Dengan adanya investasi yang sangat besar oleh Jepang, Korea di China, sehingga secara bertahap China menjadi mitra dagang Jepang yang terbesar. Sementara itu Korea Selatan semakin memimpin pasar ekspornya. Hal ini yang membuat ASEAN tertinggal dan kemudian

membentuk ASEAN +3. Bagi negara-negara di Asia timur sendiri, timbulnya regionalisme di Asia Timur tentu saja merupakan usaha baru yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah tersebut dalam peningkatan ekonomi mereka dalam rangka menghadapi peningkatan globalisasi ekonomi dan ketidak pastian dalam berbagai bentuk hubungan multilateral. Bentuk regionalisme di Asia Timur sendiri meskipun sudah bergabung dengan ikatan penyatuan kerjasama perdagangan dunia atau World Trade Organization, tetap berhati-hati dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya diluar wilayah. Mungkin itulah sebabnya mengapa negara-negara Asia Timur tidak sama halnya dengan negara-negara Asia Tenggara yang secara solid membangun kerjasama dalam satu kawasan. Negara-negara Asia Timur lebih dikenal tidak pernah membentuk organisasi sendiri.

Salah satu negara yang besar dan berpengaruh dalam perekonomian Asia Timur adalah China. Dalam bukunya, Djafar mengungkapkan bahwa terdapat dua kunci kesuksesan dari pasar China, yaitu: 1. Bangunan politik yang kuat terutama terbentuknya peran negara sebagai pengatur terdepan. 2. Peran negara yang maksimal yang mmenentukan dan amat penting untuk menggerakkan

perekonomian China yang menghadapi banyak tantangan (Djafar, 2008)

Banyak strategi China dalam pembentukkan pasarnya (Djafar, 2008, p. 65) baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Keberhasilan China dinilai bukan merupakan suatu hal yang instant. Negara ini tadinya merupakan negara dimana kemiskinan menjadi masalah utamanya mulai menduduki terpenting dalam setiap kerja sama ekonomi internasional. Integrasi ekonomi telah menarik perhatian banyak negara terutama setelah Perang Dunia II dan menjadi semakin penting sejak 1990-an. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah kesepakatan untuk mewujudkan kerangka kerjasama regional (regional arrangement) dan juga bertambahnya jumlah negara yang menjadi anggota dari kerangka kerjasama itu. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa pertimbangan politik memainkan peran penting dalam menciptakan berbagai kerjasama regional tersebut. Meski demikian ada juga yang menyatakan pertimbangan ekonomi sangat mempengaruhi upaya-upaya untuk mewujudkan kerjasama regional tersebut. (Arifin, 2008)

Kerangka integrasi ekonomi dapat dicapai dengan berbagai tingkatan. Salah satunya adalah melalui kerja sama inter-

regional¹. Salah satu contohnya adalah kegiatan-kegiatan yang tengah dilakukan oleh ASEAN dan Asia Timur. Menurut Suthipand Chirathivat, ASEAN telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan inter-regional itu (Chirathivat, 2004).

Salah satu yang telah dilakukan ASEAN adalah dengan membentuk mekanisme ASEAN+3. Tampaknya yang mendorong ASEAN untuk menciptakan mekanisme tersebut adalah pertumbuhan kekuatan ekonomi yang semakin besar dan terintegrasi dari Jepang, China dan Korea. Laporan yang berjudul "East Asian Vision Group Report," "Towards An East Asian Community, Region of Peace, Prosperity and Progress" menguraikan visi dari pembentukan komunitas Asia Timur. Visinya adalah:

(1) menciptakan perdamaian, kesejahteraan dan kemajuan yang didasari oleh perkembangan yang penuh terhadap masyarakat di kawasanya serta memberikan kontribusi positif untuk dunia;

(2) mempromosikan perdagangan;
dan

(3) mempromosikan kerja sama finansial. Laporan itu lebih jauh menyatakan ada tiga alasan tambahan mengapa perlu dibentuk komunitas Asia Timur itu.

Ketiga alasan tersebut adalah: (1) Asia Timur sendiri telah menjadi kawasan yang paling penting di dunia; (2) kesamaan letak geografis, sejarah yang hampir sama dan kesamaan norma budaya dan nilai; (3) karena adanya globalisasi didunia ekonomi, membuat negara anggota sama-sama saling membutuhkan guna memenuhi kebutuhan standar global, menyamakan negosiasi dan menyatukan negosiasi untuk perdagangan multilateral; (4) peristiwa krisis financial yang pernah terjadi di Asia memberikan untuk menghindari kegagalan yang sama; (5) menghindari perang karena adanya persaingan dan permusuhan antara negara Asia Timur; (6) menjadi inspirasi bagi negara anggota Asia Timur agar dapat meningkatkan kerjasama yang mengacu pada dasar-dasar kesepakatan Komunitas Asia Timur; (7) pada akhirnya pembentukan Komunitas Asia Timur secara garis besar bertujuan untuk : menghindari konflik dan mempromosikan perdamaian antar negara Asia Timur, meningkatkan perdagangan, keuangan, perkembangan dan kawasan,

¹ Menurut Sjamsul Hadi selain tingkat Regional terdapat tingkatan lainnya yaitu:., integrasi ekonomi dilakukan dalam berbagai tingkatan, dari tingkat multilateral, regional, intra-regional, plurilateral maupun bilateral

meningkatkan keamanan dan kesejahteraan yaitu dengan memfasilitasi usaha dari kawasan untuk perlindungan lingkungan dan pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan dengan menambah kerjasama baik dalam cakupan pendidikan maupun sumber daya manusia; dan mempertahankan identitas komunitas Asia Timur dgn mengadakan pertukaran dan dialog baik dalam tingkatan pemerintahan maupun non pemerintahan. Terkait dengan tujuan dari pembentukan kerjasama tersebut, dalam laporannya East Asia Vision Group (EAVG) melaporkan bahwa kerjasama yang ditawarkan EAVG sangat luas yaitu sebanyak 57 butir seluruh butir rekomendasi tersebut dikelompokkan kedalam 6 agenda kerjasama yaitu: (1) Bidang Ekonomi; (2) Finansial; (3) Politik dan Keamanan; (4) Lingkungan Hidup dan Energi; (5) Sosial, Kultural dan Pendidikan dan (6) Kerjasama Kelembagaan (East Asia Vision, 2001)

Salah satu substansi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada rekomendasi kerjasama dibidang Politik dan Keamanan yang salah satunya adalah membentuk think-tanks untuk menggali isu-isu jangka panjang yang sangat strategis. Landasan pemikiran terhadap rekomendasi pembentukan think-tanks

tersebut didasari untuk menghadapi ancaman-ancaman internasional serta masalah keamanan regional. Maka upaya dari pembuatan think-tank terbentuklah Network of East Asian Think-tanks yang beranggotakan 13 perwakilan dari negara anggota (East Asia Vision, 2001).

Pada awalnya ide membentuk Network of East Asian Think-tanks (yang kemudian disebut NEAT) muncul pada pertemuan “10+3” Summit. Pada pertemuan tersebut dibahas bahwa kerja sama Asia Timur membutuhkan sebuah wadah atau institusi yang mampu menjadi jaringan think-tank atau bentuk diplomasi *second track* bagi sesama negara anggota Asia Timur. Secara spesifiknya, jaringan ini yang juga diharapkan mampu mempelajari isu-isu penting yang berkaitan dengan kerja sama Asia Timur. Selain hal tersebut jaringan tersebut diharapkan mampumemberikan usulan-usulan strategis mengenai kebijakan terkait dengan kerjasama antar kawasan serta pengadaan penelitian dan laporan-laporan yang harus dilaporkan pada setiap pertemuan “10+3” Summit¹⁰. Berkaitan dengan usulan tersebut diatas lalu pada 2002, maka pada East Asia Study Group dibentuklah Network of East Asia Think-tanks (NEAT).

Selanjutnya secara resmi NEAT mengadakan kongres pertama yang diadakan di Beijing pada 29 September 2003. tiga topic utama yang dibahas adalah “Towards East Asia Cooperation”, “Important Steps Leading to East Asia Cooperation” and “Key Areas in East Asia Cooperation”. Hasil pertemuan tersebut kemudian di terbitkan dan dimuat dalam situs resmi NEAT yaitu www.neat.org. Secara resmi di gagas pada pertemuan “10+3” Summit, NEAT merupakan sebuah mekanisme untuk penelitian dan pertukaran antar akademis. Selain itu NEAT juga sebagai think-tanks antar Negara-negara Asia Timur. NEAT diidentifikasi sebagai second track daripada East Asia Cooperation. Salah satu tugas dari wadah ini adalah untuk menyediakan dukungan intelektual dan rekomendasi kebijakan pada isu-isu penting dan sebagai arah bagi East Asia Cooperation.

Kerangka Teoretik

Dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas sampailah kepada pertanyaan dari penulisan ini yaitu dilihat dari interaksi setiap negara anggota komunitas Asia Timur melalui NEAT, bagaimanakah interaksi antar negara dalam proses institusionalisme NEAT sebagai think-tank pada kerjasama Asia Timur?

serta bagaimanakah signifikansinya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kerjasama APT?

NEAT. Pada usianya yang ke- 10 NEAT harus melibatkan para professional dan penerapan standar teknis dalam setiap penelitiannya. Sebelum tahun 2012 negara anggota NEAT selalu mendelegasikan perwakilannya menghadiri WG yang tidak sesuai dengan kedua standar tersebut dan hal ini tidak dapat diteruskan (Wong, 2012). Di tahun yang sama Mursitama menyatakan hal yang sama yaitu NEAT bisa menjadi institusi internasional yang matang apabila menjalankan 4 hal dibawah ini:

1. Secara berkelanjutan menjadi penggerak di pembangunan komunitas Asia Timur berdasarkan kearifan bersama dan kepentingan bersama
2. Harus diperkuat dan disertakan dengan kanal- kanal seperti pertemuan bersama *track 1* terutama SoM +3 atau DG +3. Serta harus melakukan diskusi regular dengan unit ASEAN+3 di kantor ASEAN Secretariat di Jakarta
3. Membuat kantor sekretariat yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan dan koordinasi antar

anggota dan *thinktank* lain. Membuat *taskforce* yang berfokus kepada pembuatan kebijakan juga penting sebagai mekanisme NEAT yang baru.

4. Pemerintah dari negara Kawasan ASEAN +3 harus memberikan pendanaan untuk NEAT dan mendukung pembentukan pendanaan NEAT. Penambahan sumber dana dari sector privat dan institusi internasional juga harus di adakan. (Mursitama, *Second Track Diplomacy in ASEAN+3: The Case of Indonesia and Network of East Asian Thik-Tanks* (NEAT, 2012)

Integrasi Ekonomi.

Integrasi ekonomi telah menjadi elemen penting dalam proses pengambilan kebijakan pada tingkat internasional. (Arifin, 2008, p. 219)

Integrasi ekonomi sendiri menurut Jovanovic adalah suatu kombinasi atau penyatuan beberapa perusahaan dalam suatu industri baik secara vertikal maupun horizontal (Veseth, 1996, p. 25). Namun menurut Veseth, integrasi ekonomi merupakan suatu proses dimana sekelompok negara-bangsa setuju untuk mengenyampingkan batasan nasionalitasnya semata-mata untuk

mencapai tujuan ekonominya. Selain itu hal tersebut dilakukan untuk menciptakan pasar yang lebih luas dan mengikat dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. (Veseth, 1996)

Menurutnya terdapat beberapa tahapan dalam integrasi ekonomi yang bisa dicapai oleh bangsa-bangsa (Veseth, 1996, pp. 219-220). Namun apapun tahapan yang mereka gunakan pada dasarnya sekelompok negara yang melakukan integrasi ekonomi bertujuan untuk mencapai efisiensi yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi (Veseth, 1996, p. 221). Balassa membedakan integrasi sebagai konsep dinamis melalui penghapusan diskriminasi diantara negara yang berbeda, maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi (Bela, 1976). Sementara Holzman mengatakan integrasi ekonomi merupakan situasi dimana dua kawasan menjadi satu atau mempunyai satu pasar yang ditandai harga barang yang factor produksinya sama diantara dua kawasan tersebut (Arifin, 2008, p. 25). Namun terlihat jelas memang tidak ada satu definisipun yang baku tentang integrasi ekonomi. Para ekonom hingga kini terus mengembangkan berbagai definisi mengenai integrasi ekonomi dari berbagai sudut pandang yang berbeda satu

sama lain (Veseth, 1996). Dari berbagai macam definisi diatas mengenai integrasi ekonomi, Jovanovic menyuarikan bahwa integrasi ekonomi merupakan hal yang sangat kompleks dan harus berhati-hati dalam mendefinisikannya. Ia juga mengatakan integrasi ekonomi merupakan upaya dari sekelompok negara dalam meningkatkan tingkat kemakmurannya.

Institusi internasional

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan serta sistem politik di beberapa negara kedua paradigma mengenai institusi internasional diatas mengalami perkembangan. Ruggie mengatakan bahwa keduanya tidak banyak menawarkan sistem yang transformatif (Ruggie, 2003). Neoliberal hanya menawarkan pola pikir yang reproduktif namun tidak transformatif bagi institusionalisme. Sementara Neorealis karena berdasarkan pada state power maka hanya menanggapi setiap proses institusionalisme dengan tuntutan bukanya bertransformasi (Ruggie, 2003). Sementara itu hampir sama dengan cara pandang Neorealis tetapi juga menyerap sistem Neoliberal, Ikenberry menjabarkan model institusionalisme pada masa kini. Menurut Ikenberry bergabungnya negara kedalam sebuah institusi internasional adalah karena melalui institusi internasional dapat

tercipta kondisi yang stabil dan kondusif (Ikenberry, 1998-199). Dengan situasi seperti itu sebuah institusi akan dimanfaatkan oleh negara kuat untuk memaksakan kepentingannya (Ikenberry, 1998-199). Lalu mengapa negara lemah mau bergabung dengan negara kuat didalam sebuah institusi dan membiarkan negara kuat memaksakan kepentingannya? Bagi negara lemah sebuah institusi memiliki batasan dan pengawasan terhadap setiap perilaku negara kuat. Hal tersebut yang membawa negara lemah kedalam sebuah institusi internasional. Karena negara lemah akan menjadi subyek dari kekuasaan negara kuat apabila mereka bergabung kedalam non-institusi. Didalam badan noninstitusi tidak ada pengawasan dan batasan terhadap negara kuat (Ikenberry, 1998-199). Model institusi modern setelah neoutilitarian, Ruggie berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) tahap pembentukan institusi internasional yaitu;

- (1) Epistemic Communities;
- (2) International Regimes; dan
- (3) Formal International Organizations (Ruggie, 2003, p. 55).

(1) Epistemic Communities merupakan aspek yang dibutuhkan dalam proses institusionalisasi. Menurut Ruggie, sebuah proses institusionalisasi tidak selalu hanya membutuhkan jaringan organisasi saja

namun juga membutuhkan sudut pandang dari ranah ilmu yang mampu memberikan gambaran hubungan politik.

(2) International Regimes, pada tahap ini tahap institusionalisasi telah mencapai proses dimana telah adanya misi bersama, pembagian peranan, aturan-aturan main, visi organisasi, rancangan keuangan, dan energi yang telah disepakati oleh sekelompok negara-negara.

(3) International Organization (IO) merupakan tahap yang terpenting dari ketiga tahap yang ada. Ruang lingkup dari tugas mereka adalah pada international regime. Singkatnya, tahapan IO merupakan bentuk dimana bermacam-macam kebijakan berada didalamnya dengan tujuan untuk kepentingan international regime yang membentuknya.

Pembahasan

Metodologi yang dilakukan untuk penulisan ini adalah metode dokumentasi yaitu berdasarkan dokumen-dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh pertemuan Asia Timur dan NEAT. Jenis metode penelitian dokumentasi seperti ini pada umumnya sepenuhnya berfokus kepada laporan-laporan dan informasi resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau agen internasional (Neuman, 2000). Karena itu penelitian ini menggunakan dokumen-

dokumen yang dikeluarkan oleh Asia Timur dan NEAT. Namun selain itu, model metode penelitian dokumen memiliki keterbatasan untuk menjelaskan setiap rinci proses dari kerjasama dari setiap negara. Oleh sebab itu, penjelasan yang lebih terperinci didapatkan melalui metode wawancara dan studi literatur.

Adapun pola pengolahan dokumen yang dilakukan yaitu; (1) penulis mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Asia Timur dan NEAT; (2) mengkategorikan berdasarkan setiap pertemuan NEAT; (3) mengklasifikasikan setiap hasil dari pertemuan NEAT; dan (4) menarik kesimpulan bagaimana pergerakan negara anggota NEAT dalam menginstitutionalisasi NEAT melalui setiap interaksi dalam NEAT.

NEAT sebagai Epistemic Community Dari analisa tersebut dapat terlihat ciri khas dari sebuah institusi internasional yang dimiliki oleh NEAT. Ciri yang pertama memperlihatkan bahwa NEAT merupakan sebuah jaringan yang terdiri dari kelompok akademisi yang memiliki keahlian atau kompetensi mengenai kebijakan internasional. Dalam setiap pertemuan yang diadakan NEAT menghasilkan berbagai macam rekomendasi kebijakan terkait isu-isu

tertentu. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lahir dari adanya penelitian yang relevan. Seperti yang diadakan oleh WG. Dari ciri khas diatas menggambarkan bahwa NEAT berada pada tahap Epistemic Community dalam tingkatan institusi internasional Ruggie. Epistemic Communities merupakan aspek yang dibutuhkan dalam proses institusionalisasi. Menurut Ruggie, sebuah proses institusionalisasi tidak selalu hanya membutuhkan jaringan organisasi saja namun juga membutuhkan sudut pandang dari ranah ilmu yang mampu memberikan gambaran hubungan politik. Atas dasar teori tersebut Haas memfokuskan makna Epistemic Community. Haas, 1992, berpendapat bahwa Epistemic Community adalah sebuah jaringan yang didalamnya terdapat para ahli dan kaum profesional yang menguasai dan memiliki keahlian dalam pemahaman kebijakan luar negeri¹. Didalam Epistemic Community mereka memiliki persamaan prinsip dan norma yang secara rasional memiliki dasar nilai bagi suatu aksi sosial dalam anggota komunitas. Persamaan berikutnya yang dimiliki anggota Epistemic Community ini adalah keyakinan akan adanya sebab musabab. Keyakinan ini muncul karena adanya penelitian mengenai beberapa masalah. Lalu penelitian tersebut menguraikan bahwa keterkaitan antara satu

kebijakan dengan kebijakan yang lainnya akan memunculkan perilaku yang diharapkan. Persamaan berikutnya adalah adanya rasa praduga untuk mencari kebenaran dan menimbang kebenaran-kebenaran yang masih dalam keahlian mereka tersebut. Hal terakhir yang dimiliki oleh sebuah Epistemic Community adalah adanya usaha untuk membuat sebuah rancangan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat³. Seiring dengan teori Haas, beberapa WG yang diadakan oleh NEAT diadakan untuk meneliti fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kemudian hasil dari WG tersebut menggambarkan sikap atau respon politik yang sebaiknya di lakukan melalui rekomendasi kebijakan internasional. Apabila dibandingkan dengan think tanks lainnya seperti ASEAN ISIS, terdapat jarak yang sangat panjang antara NEAT dengan ASEAN ISIS. Apabila menggunakan pendekatan sejarahnya saja ASEAN ISIS sudah mencapai 22 tahun berdiri. Menurut Feld dengan menggunakan pendekatan sebuah institusi internasional maka dapat diukur tingkat keberhasilan maupun kegagalanya. Sebagai sebuah think tank ASEAN ISIS selalu berusaha untuk bergerak maju⁴. Beberapa langkah yang sudah ditempuh ASEAN ISIS antara lain mengadakan pertemuan bersama dan dialog interaktif

dengan kalangan pemerintahan ASEAN pada 1991 di Jakarta. Selain itu ASEAN ISIS juga telah membuat memorandum yang menjadi dasar pergerakan dan inisiasi yang tidak hanya untuk pemerintahan ASEAN namun juga untuk mitra kerja ASEAN. Berbagai langkah yang telah ditempuh oleh ASEAN ISIS ini mencerminkan kematangan dan konsistensi sebuah think tank terhadap kerjasama regional. Hal tersebut membuat ASEAN ISIS sebagai salah satu think tank yang menginspirasi think tank lain di kawasan Asia Pasifik.

Tulisan ini memaparkan analisa interaksi setiap CCM yang diadakan oleh NEAT. Mulai dari CCM ke 6 sampai dengan CCM ke 9. karena diantara jangka waktu tersebut NEAT Indonesia menjadi *chairman* NEAT. Tepatnya pada CCM ke 8 dan CCM ke 9. Proses analisis penelitian ini yang pertama penulis mengklasifikasikan setiap Working Group yang berlangsung mulai dari CCM ke 6 sampai dengan CCM ke 9. Selanjutnya setiap CCM dituliskan negara sponsornya. rekomendasi kebijakan yang dihasilkan WG tersebut. Melalui hasil-hasil WG yang dibahas dalam CCM tersebut penulis berfokus kepada negara sponsor masing-masing WG dan latar belakang diadakannya WG tersebut dan tanggapan dari anggota

NEAT lainya pada WG berikutnya. Lalu penulis menjumlahkan banyaknya WG yang disponsori oleh setiap negara.

Dibawah ini adalah table dari topik WG dan negara yang menyelenggarakan setiap WG selama 10 tahun yaitu 2009-2019:

Working Group	Sponsored	Year
The 7th Annual Conference in Seoul, Korea (August 30 - September 1, 2009)		
East Asian Food Security	Japan	2009
East Asian Environmental Cooperation	Japan	2009
	Singapore	
East Asian Financial Cooperation	China	2009
East Asian Investment Cooperation	China	2009
Enhancement of East Asian Cultural Exchange	Korea	2009
The 8th Annual Conference in Manila, the Philippine (August 23 - 24, 2010)		
East Asian Food Security	Japan	2010
East Asian Financial Cooperation	China	2010
Cultural Exchange	Korea	2010
East Asian Trade and Investment Facilitation	China	2010
Water Resource management	Singapore	2010
East Asian Evolving Regional Architecture	Thailand	2010
9th Annual Conference in Danang, Vietnam (August 10-12, 2011)		
East Asian Disaster Managements	China	2011
The Enhancement of Cultural Exchange in East Asia	Korea	2011
Regional Cooperation on Disaster Management in East Asia	Japan	2011
East Asian Trade and Investment Facilitation and Connectivity	China	2011
10th Annual Conference in Beijing, China (August 26-28, 2012)		
Regional Cooperation on Disaster Management in East Asia	Japan	2012
NEAT: the Next Ten Years	China	2012
The Enhancement of Cultural Exchange in East Asia	Korea	2012
Inclusive Growth: A New Development Challenge and a New	Singapore	2012

Ground for Regional Cooperation		
	Indonesia	2012
11th Annual Conference in Kuala Lumpur, Malaysia (August 25-27, 2013)		
Enhancing People to People Connectivity -Education, Tourism and Cultural Exchange	Japan	2013
Financing Infrastructure Connectivity in East Asia: Challenges and Solutions	China	2013
Inclusive Growth (Phase II)"Social Welfare Policies in East Asia: Sharing Experiences for a New Ground of Regional Cooperation"	Indonesia	2013
	Singapore	2013
12th Annual Conference in Phnom Penh, Cambodia (September 28-30, 2014)		
Accelerating the RCEP Process through Strengthening APT Cooperation	China	2014
Governance of Extractive Industries in East Asia	Indonesia	2014
Enhancing People to People Connectivity -Education, Tourism and Cultural Exchange	Japan	2014
A New Wave of Urbanization	Singapore	2014
13th Annual Conference in Bandung, Indonesia (September 6-8, 2015)		
East Asian Poverty Reduction	China	2015
Urbanisation	Singapore	2015
Maritime Cooperation in East Asia	Japan	2015
Towards Seamless Connectivity	Thailand	2015
14th Annual Conference in Bangkok, Thailand (July 27-29, 2016)		
Migration	Thailand	2016
The Road towards the East Asia Economic Community (EAEC) 2020	China	2016
Enhancement of Regional Health in East Asia with Special Reference to the Public Health and Universal Health Coverage	Japan	2016
Institutional Sustainability of NEAT: Towards the East Asian Community	Korea	2016
15th Annual Conference in Busan, Korea (September 6-8, 2017)		
Small & Medium-sized Enterprises Cooperation	China	2017
Water Pollution	Indonesia	2017
Active Ageing	Thailand	2017
Healthcare System amid Population Ageing in East Asia	Japan	2017
16th Annual Conference in Yangon, Myanmar (September 17-18, 2018)		

Mapping an EAEC Blueprint 2030: For an Open and Innovative East Asia	China	2018
East Asian Socio-Cultural Connectivity	Korea	2018
Enhancing the East Asian Food Security Mechanism: APTERR's contribution to Food Security and Disaster Prevention	Japan	2018
Mainstreaming Disability in East Asia Economic Community: Breaking Barriers and Creating Inclusive Society Through Mutual Collaboration	Thailand	2018
NEAT 31st Country Coordinators Meeting (CCM) and 17th Annual Conference in Tokyo, Japan (August 22-23, 2019)		
Networking Cultural Institutions for Socio-Cultural Connectivity in East Asia	Korea	2019
Towards Building a Sustainable Society in East Asia	Japan	2019

Dari table diatas dapat terlihat peran NEAT China dan NEAT Jepang dalam tulisan ini menemukan bahwa selama 10 tahun terdapat 2 negara anggota NEAT yang berperan kuat pada setiap pergerakan NEAT. Selain dari ide-ide mereka yang diutarakan pada setiap CCM juga adanya beberapa WG yang lebih banyak diadakan oleh kedua negara NEAT tersebut. Mereka adalah NEAT China dan NEAT Jepang. Terdapat 2 WG yang secara konsisten diadakan oleh China yaitu WG East Asian Investment Cooperation dan WG East Asian Financial Cooperation. Sementara NEAT Jepang mengadakan WG Overall Architecture of Community Building in East Asia dan East Asia Environmental Cooperation. Peranan kedua negara ini dalam NEAT yang terlihat sangat menonjol dikhawatirkan akan melunturkan prinsip utama konsep

kerjasama APT dimana ASEAN merupakan motor penggerak dalam setiap aspek kerjasama APT. Adanya dominasi ide ini berakibat kepada rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh NEAT juga didominasi oleh kepentingan nasional kedua negara tersebut. Hal tersebut karena setiap rekomendasi kebijakan dirumuskan dari penelitian dalam WG.

Negara	Jumlah WG yang disponsori
China	21
Japan	18
Singapore	10
Korea	9
Thailand	6
Malaysia	4
Indonesia	4
Philippines	1

Hal diatas terjadi adalah karena masih adanya prinsip pengaruh negara kuat seperti yang dipaparkan oleh Ruggie pada awal penulisan. Ruggie mengungkapkan bahwa negara yang memiliki power sangat memanfaatkan kerjasama transnasional. Hubungan transnasional biasanya dimanfaatkan oleh negara-negara yang lebih besar atau power untuk memaksakan kepentingannya melalui sebuah institutional arrangement. Institutional arrangement inilah yang menjadi kepentingan tersendiri bagi negara-negara yang memiliki power untuk

bergabung dengan negara lemah. Kepentingan tersebut adalah karena berarti negara yang memiliki power tersebut mampu membuat negara lainya terikat dalam sebuah komitmen. Ikatan ini biasanya berjangka waktu cukup panjang. Hal tersebut berarti menghemat sumber daya negara besar “power” tersebut karena tidak perlu lagi menyampaikan kepentingannya secara G to G dengan negara yang dituju. Hal berikutnya yang menarik negara “power” untuk ikut kedalam sebuah institusi internasional adalah karena adanya derajat keeratan. Derajat keeratan ini adalah apabila didalam institusi internasional tersebut ada sebuah negara “power” mengalami penurunan power. Maka institusi akan tetap memperpanjang dan melindungi power negara tersebut⁸.

Temuan ini berbanding terbalik dari temuan yang disampaikan oleh Mursitama (2012) dalam makalahnya dimana dibawah kepemimpinan Indonesia ASEAN seharusnya menjadi pemimpin dalam kemajuan dari proses institusionalisme NEAT. Belum adanya keterlibatan sektor lain selain akademisi juga menunjukkan bahwa proses institusionalisme yang belum berimbang untuk seluruh anggota NEAT.

Critical Review Sebagai sebuah Epistemic Community penelitian ini menilai bahwa peranan NEAT belum mencapai titik maksimal. Penilaian tersebut terlihat dengan tidak adanya rekomendasi yang secara signifikan diserap atau diwujudkan kedalam kebijakan kerjasama APT. Seperti misalnya adanya pembentukan East asian Summit yang sama sekali bukan hasil rekomendasi dari NEAT. Selain itu isu yang paling kuat secara konsisten dibahas dalam NEAT adalah pembahasan mengenai dana utama yang dimiliki NEAT. Hal tersebut karena bahkan NEAT memasukan isu tersebut kedalam WG khusus untuk mendapatkan jawaban mengenai masalah dana tersebut. WG khusus tersebut bahkan belum mencapai titik terang meskipun telah diadakan pertemuan beberapa kali. Hal tersebut semestinya tidak perlu muncul kepermukaan. Pernyataan tersebut adalah karena NEAT sebagai sebuah wadah track 2 yang dibentuk atas inisiasi pemerintah (track 1) APT sepatutnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab APT disetiap aspek, khususnya pendanaan. Kedua hal yang dipaparkan diatas merupakan sebagian dari unsur nonmaksimal dalam proses institusionalisasi NEAT. Unsur-unsur tersebut menggambarkan NEAT sebagai sebuah Epistemic Community

yang pada awalnya lahir dari kesepakatan antar pemerintah APT (track 1) kini seolah berjalan sendiri. Sebagai sebuah institusi yang mewadahi track 2 seharusnya hubungan kedua elemen, track 1 dan track 2, komunikatif sehingga terwujud bentuk kerjasama yang baik. Selain itu akan meminimalisasi tidak adanya rekomendasi kebijakan yang dipakai sebagai kebijakan nyata.

Kesimpulan

Kerjasama ASEAN +3 (APT) menjadi sebuah tanda adanya perkembangan ditingkat kerjasama regional baik untuk ASEAN maupun negara- negara Asia Timur sendiri. Untuk meningkatkan proses kerja sama tersebut disusunlah beberapa program kerja. Diantaranya adalah pembentukan think-tank. Berdasarkan program kerja tersebut maka terbentuklah NEAT. Terbentuknya NEAT direpresentasikan sebagai salah satu langkah penting dalam kerja sama Asia Timur karena didirikan oleh wadah kalangan intelektual dan didukung oleh pemerintahan kerjasama Asia Timur. Keberadaan NEAT merupakan wadah bagi track 2 antar negara anggota kerjasama Asia Timur. NEAT dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan proses saling berinteraksi dan bertukar ide antar kalangan dalam tatanan akademika

sehingga mampu menyediakan dorongan secara intelektual bagi kerjasama Asia Timur. Keberadaan NEAT menjadi sebuah institusi yang memberikan pandangan mengenai situasi politik kawasan oleh kalangan akademisi. Pandangan tersebut dirumuskan kedalam bentuk rekomendasi kebijakan yang kemudian diajukan kepada para pemimpin APT. Sebagai sebuah think-tank NEAT terus memperbaharui visi dan misinya. Hal tersebut agar sejalan dengan situasi politik yang ada dan dengan perkembangan kerjasama APT sendiri. Salah satunya adalah dengan meningkatkan tahap NEAT sebagai sebuah institusi internasional. Pada akhirnya hasil dari penelitian ini membenarkan hipotesis yang dipaparkan pada awal penulisan. Bahwa interaksi dari negara-negara anggota NEAT berhasil mewujudkan proses institusionalisasi NEAT dalam kerjasama APT. Hingga tahun 2019 proses institusionalisasi NEAT berada pada tahap Epistemic Community. NEAT berhasil memberikan sudut pandang dari ranah ilmu yang mampu memberikan gambaran hubungan politik. Selain itu juga setiap kegiatan yang diadakan oleh NEAT mendukung teori Feld bahwa sebuah Epistemic Community murni meneliti kondisi sosial dan politik. Selain itu

Epistemic Community memegang teguh prinsip keyakinan akan adanya sebab akibat yang kemudian merefleksikan pandangan-pandangan politik atau kebijakan. Selain ciri normatif yang terlihat pada interaksi setiap negara NEAT diatas, dalam prosesnya NEAT sendiri terjadi hegemoni ide. Dominasi ide dan pemikiran ini terjadi dalam setiap pertemuan CCM. Negara-negara yang tergambar berusaha melakukan hegemoni ide adalah Jepang dan China.

Referensi

Buku

- Arifin, Sjamsul. (2008). *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:Memperkuat Sinergi ASEAN Ditengah Kompetisi Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Bela ,Balassa. (1976)Types of Economic Integration, World Bank Reprint Series. Washington, D.C.
- Chirathivat, Suthipand. (2004). ASEAN's Role and Interests in the Formation of East Asian Regionalism. Political Issues and Economic Perspectives.101.

Djafar, Zainuddin. (2008)Indonesia, Asean dan Dinamika Asia Timur: Kajian Perspektif Ekonomi-Politik, Jakarta:Pustaka Jaya.

Neuman, W. Lawrence. (2000). Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches (4th ed.). United States of America

Rodolfo C. 2006). Severino. South East Asia in Search of an ASEAN Community. Singapore:ISEAS.

Ruggie,John Gerrard. (2003). Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization (2nd ed.).London:Routledge.

Soesastro, Hadi, &Joewono, Clara. (2006). Twenty Two Years of ASEAN ISIS Origin, Evolution and Challenges of Track Two Diplomacy. Yogyakarta: Kanisius Media.

Sungkar, Yasmin. (2005). Strategi ASEAN Dalam Perluasan ASEAN +3. Jakarta: LIPI. Veseth , Michael. 1996) Introduction to International Political Economy. United States of America: Prentice-Hall, Inc.

• Dokumen East Asia Vision Group. (2001). Towards an East Asian Community: Region of Peace, Prosperity and Progress. East Asia Vision Group Report.

Website

NEAT 2004. Februari 2010
<http://www.neat.org.cn/english/zjdyen/index.php?topicid=001001>

CSCAP. (1999). Juni 2010. CSCAP is A Non-Governmental (secondtrack) Process for Dialogue on Security Issues in the Asia Pacific.
<http://www.cscap.org/>

Diamond, Dr. Louise. McDonald, John. (1996).Multi-Track Diplomacy. United States of America: Kumarian Press.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Indonesia. (2001). Pemulihan Ekonomi Indonesia Melalui Kerjasama Investasi dan Perdagangan Dengan Mitra Wicara ASEAN +3 (China-Jepang-Korea Selatan). Jakarta:Author.

Feld, Werner. J., &Jordan, Robert. S. (1983). International Organizations: A Comparative Approach. New York: Praeger.

Ikenberry,G. John. (2003). State Power and the Institutional Bargain: America's Ambivalent Economic

and Security Multilateralism. US Hegemony and International Organizations. New York: Cambridge University Press.

Krasner, Stephen.D. (1995). Power politics, institutions, and transnational relations. Bringing transnational relations back in. New York: Cambridge University Press.

Jurnal

Phar, Kim Beng. (2001). Track Two Discussion and Regionalism.

Haas, Peter.M. (1992). Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination. Journal of International Organization.

Ikenberry, John. (1998). Institutions, Strategic Restraint, and the Persistence of American Postwar Order

Sundstorm, Mikael.(2000). A Brief Introduction: What is an Epistemic Community?.

Mursitama, Tirta.(2012). Second Track Diplomacy in ASEAN+3: The Case of Indonesia and Network of East Asia Thinktanks (NEAT).

Wong, John. 2012 Thinktanks in East Asia in Need of More Cooperation and Networking: NEAT After its Ten Years